

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Tionghoa merupakan salah satu etnis yang menyebar luas di seluruh belahan bumi. Etnis yang berasal dari dataran Tiongkok ini mulai masuk ke negara Indonesia pada perkiraan abad ke-15 M (Al Qurtuby, 2003:37). Kedatangan etnis ini ke Indonesia memiliki niat awal untuk berdagang dan ada pula yang mengatakan untuk menyebarkan ajaran mereka. Terlepas dari latar belakang sejarahnya, Etnis Tionghoa sampai saat ini telah menyebar luas di seluruh wilayah Nusantara. Berdasarkan sumber data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010, keberadaan Etnis Tionghoa di Indonesia sebanyak 2.832.510 jiwa dan menempati peringkat ke-18 dari suku terbanyak di Negara Indonesia.

Tabel 1.1.1.Persentase Penduduk
Menurut Kelompok Suku Bangsa Tahun 2010

Suku Asal Nusa Tenggara Timur	4 184 923	1,77	12
Dayak	3 009 494	1,27	17
Banjar	4 127 124	1,74	13
Suku Asal Kalimantan lainnya	1 968 620	0,83	22
Makassar	2 672 590	1,13	20
Bugis	6 359 700	2,69	8
Minahasa	1 237 177	0,52	29
Gorontalo	1 251 494	0,53	28
Suku Asal Sulawesi lainnya	7 634 262	3,22	4
Suku Asal Maluku	2 203 415	0,93	22
Suku Asal Papua	2 693 630	1,14	19
Cina	2 832 510	1,2	18
Asing/Luar Negeri	162 772	0,07	31
Total	236 728 379	100	

Sumber: Data Sekunder <http://sp2010.bps.go.id/>

Tabel tersebut menunjukkan bahwa 2.838.510 jiwa penduduk Tionghoa di Indonesia merupakan 1,2% dari total penduduk Indonesia pada tahun 2010. Banyaknya etnis Tionghoa di Indonesia tidak lantas mendapatkan penerimaan yang mutlak dari pribumi Indonesia terutama di daerah Jawa. Kurang diterimanya etnis ini di daerah Jawa diakibatkan oleh adanya campur tangan sejarah kolonial Belanda yang menjalankan politik adu-domba di antara kedua belah pihak (Tionghoa-Pribumi) untuk tujuan memonopoli perdagangan rempah-rempah. Salah satu contoh nyata dari adanya politik tersebut adalah meletusnya perang *Chinezenmonrd* (pembantaian orang China) di Batavia tahun 1740 (Al Qurtuby, 2003:11).

Pada masa setelah kemerdekaan Indonesia, kesenjangan antara Tionghoa dan pribumi Jawa masih berlanjut. Hal tersebut terjadi karena beberapa alasan, selain masalah etnisitas yang merupakan perbedaan mendasar. Kesenjangan juga muncul karena adanya kecemburuan sosial ekonomi pribumi Jawa terhadap Etnis Tionghoa yang mayoritas memiliki status ekonomi lebih tinggi sehingga dimata pribumi, Tionghoa adalah etnis yang hanya mementingkan kekayaan. Sebagai pendatang Tionghoa mampu mendominasi sektor ekonomi melebihi pribumi terutama dibidang perdagangan. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh faktor sosial kultural mereka yang mengajarkan kerjasama sesama Etnis Tionghoa, sifat ulet, rajin, hemat dan bisa hidup menderita hingga mereka berhasil (Noordjanah, 2010: 39-40).

Kesenjangan antara pribumi dan Tionghoa juga muncul dengan adanya anggapan dari Tionghoa bahwa golongan pribumi tidak lebih baik dari golongan mereka. Orang-orang Tionghoa terutama para totok menganggap bahwa pribumi hanyalah sebatas golongan kuli dan buruh (Noordjanah, 2010: 53). Bahkan Tionghoa peranakan juga dianggap tidak lebih dari golongan kuli dan buruh, karena telah terkontaminasi oleh darah pribumi.

Anggapan rendah etnis Tionghoa terhadap pribumi juga turut mempengaruhi pilihan mereka dalam menganut agama tertentu. Banyak Etnis Tionghoa Indonesia yang kemudian tidak mau menganut Agama Islam. Mereka menganggap bahwa Agama Islam itu identik dengan pribumi dan meninggalkan kesan seperti pribumi itu sendiri, yaitu: bodoh, malas, terbelakang (Murfia, 2014:1). Karena adanya stigma bahwa

masuk Islam membuat derajat sosial mereka rendah seperti pribumi (Maulana, 2011: 124), kebanyakan dari mereka kemudian memilih menganut Agama Kristen dengan alasan agar memiliki derajat tinggi seperti orang-orang Eropa (Andjarwati Noordjanah, 2010: 57). Hal ini semakin diperkuat oleh Suryadinanto pada buku *“Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa”* yang menyatakan bahwa:

“Etnis Tionghoa mempertahankan identitas Tionghoa hingga tingkat tertentu melalui agama mereka. Ini dimungkinkan karena mayoritas pribumi Indonesia beragama Islam, sedangkan orang Tionghoa memeluk Kristen, Budha, Tao, Kong Hu Cu, atau kombinasi ketiga agama terakhir” (Suryadinanto, 1999: 24).

Kecenderungan non-muslim bagi Etnis Tionghoa tentu menjadikan keberadaannya semakin sulit membaur dengan masyarakat pribumi yang mayoritas beragama Islam. Sementara itu, Tionghoa yang kemudian memeluk Islam karena sebab pernikahan atau sebab lain sangatlah sedikit bahkan sampai tidak diketahui oleh Tionghoa lainnya. Mereka cenderung melakukan ibadah secara sembunyi-sembunyi agar tetap diterima dalam lingkungan Tionghoanya. Hal inilah yang kemudian semakin memperkuat anggapan masyarakat pribumi bahwa Tionghoa adalah non-muslim yang tidak bisa mereka terima keberadaannya. Padahal pada kenyataannya, terdapat pula Tionghoa yang memeluk Agama Islam.

Pemeluk Agama Islam di Indonesia bukan hanya dari kalangan pribumi Indonesia saja tetapi juga oleh etnis pendatang di Indonesia lainnya, termasuk etnis Tionghoa. Jumlah Tionghoa Indonesia yang memeluk Agama Islam hingga tahun 2013 ±14.000 jiwa atau sekitar 0,5% dari perkiraan seluruh Tionghoa yang ada di Indonesia (Murtadlo, 2013: 283). Akan tetapi karena kecenderungan non-muslim yang sudah terlanjur menyebar di kalangan masyarakat, maka semua Tionghoa dianggap non-muslim, matrealistis dan beberapa sifat negatif lainnya. Padahal apabila ditelisik lebih mendalam, Etnis Tionghoa juga memiliki andil dalam menyebarkan Agama Islam di Indonesia.

Islamisasi Indonesia oleh Etnis Tionghoa dibuktikan oleh beberapa peninggalan bersejarah yang mengandung unsur Tionghoa pada masa penyebaran Agama Islam

pertama kali di Jawa, serta adanya kepercayaan bahwa *Wali Songo* atau sembilan wali yang merupakan para tokoh yang menyebarkan Islam di Jawa masih merupakan keturunan Tionghoa. *Sino-Javanese Muslim Culture* atau lebih dikenal dengan “Teori China” kemudian dihidupkan kembali oleh beberapa organisasi Islam-Tionghoa di Indonesia. Organisasi yang saat ini masih merupakan naungan Islam-Tionghoa di Indonesia adalah PITI (Persatuan Islam Tionghoa Indonesia).

PITI merupakan organisasi resmi Islam-Tionghoa yang jaringannya tersebar luas di seluruh wilayah negara Indonesia, terutama pulau Jawa. Organisasi ini didirikan pertama kali pada tahun 1932. Setelah sempat dibubarkan karena kondisi politik Indonesia yang tidak stabil, PITI kemudian didirikan kembali di Jakarta pada tanggal 14 April 1961. Beberapa nama yang mendirikan PITI adalah H. Abdul Karim Oei Tjeng Hien, Almarhum Abdusomad Yap A Siong dan almarhum Kho Goan Tjin. Organisasi PITI didirikan dengan tujuan mempersatukan Muslim-Tionghoa di Indonesia dalam satu wadah yang dapat lebih berperan dalam proses persatuan bangsa Indonesia. Berpusat di kota Jakarta kemudian berkembang pesat di seluruh daerah dengan didirikannya DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) di wilayah provinsi dan DPD (Dewan Pimpinan Daerah) di wilayah kota atau kabupaten, termasuk di Kota Surabaya.

Surabaya merupakan ibu kota Jawa Timur dan dihuni oleh berbagai macam etnis. Diantara 2.765.487 jiwa penduduk kota Surabaya (berdasarkan survey penduduk 2010), terdapat pula penduduk yang merupakan Etnis Tionghoa. Keberadaan Etnis Tionghoa di Surabaya sudah tercatat sejak tahun 1920 dan semakin bertambah seiring dengan migrasi masyarakat Tiongkok ke Indonesia dan lahirnya Tionghoa peranakan melalui pernikahan antara Tionghoa dan pribumi.

Perkembangan Etnis Tionghoa di kota Surabaya kemudian menjadi salah satu alasan didirikannya DPD PITI (Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia) Surabaya. Berdirinya DPD PITI Surabaya ini juga didasarkan atas kenyataan akan adanya kelompok masyarakat (khususnya masyarakat Tionghoa) di Surabaya yang memerlukan wadah untuk bergerak dan bertukar wawasan, pengalaman dan bersama-sama membangun silaturahmi antar Tionghoa muslim. Selain itu, DPD PITI Surabaya juga memiliki misi untuk melakukan gerakan islamisasi dan menjadi

wadah bagi Tionghoa mu'allaf yang sementara waktu mendapat pertentangan dari keluarga asal karena masuk Agama Islam, sekaligus sebagai wadah bagi mereka untuk mempersiapkan diri hidup di lingkungan masyarakat baru, yaitu masyarakat muslim. Realisasi misi dan visi DPD PITI Surabaya ini kemudian menjadi suatu proses pembentukan identitas baru bagi Etnis Tionghoa terutama yang beragama Islam. Hal inilah yang menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai proses pembentukan identitas agama masyarakat Tionghoa, dengan penelitian yang diberi judul "*Identitas Agama Masyarakat Tionghoa (Proses Pembentukan Identitas Baru Masyarakat Tionghoa oleh DPD PITI Surabaya)*".

1.2.Rumusan Masalah

- A. Bagaimanakah proses pembentukan identitas agama masyarakat Tionghoa oleh DPD PITI Surabaya ?

1.3.Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang dicapai, yaitu:

- A. Mengetahui proses pembentukan identitas agama masyarakat Tionghoa oleh DPD PITI (Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia) Surabaya dan jenis identitas yang berhasil dibentuk.

1.4.Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1.4.1. Manfaat Teoritis

- A. Menjadi bahan masukan bagi peneliti lain dalam membahas masalah yang berhubungan dengan Tionghoa muslim terutama mengenai proses pembentukan identitas agamanya oleh DPD PITI (Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia) di kota Surabaya.
- B. Mampu dijadikan bahan analisis dalam mengasah kemampuan akademik yang telah didapatkan peneliti dalam bangku perkuliahan.

1.4.2. Manfaat Praktis

- A. Menjadikan masyarakat umum mengetahui kajian mengenai Tionghoa muslim, terutama mengenai DPD PITI (Dewan Pimpinan Daerah

Persatuan Islam Tionghoa Indonesia) Kota Surabaya dan proses pembentukan identitas agama bagi Tionghoa.

- B. Mampu dijadikan bahan pertimbangan untuk pembuat kebijakan dalam membuat kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat Tionghoa dan DPD PITI (Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia) di kota Surabaya.